

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Salah satu hal penting yang menjadi tolok ukur kemajuan suatu bangsa adalah pembangunan. Pengaruh globalisasi yang melanda seluruh negeri menuntut untuk menjadikan kondisi pembangunan suatu bangsa harus menjadi efektif, efisien, dan kompetitif. Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan usaha tanpa akhir. Pembangunan memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat suatu bangsa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan (Mardikanto, 2015:4). Pada Negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah adalah rangkaian pembangunan yang berkesinambungan secara menyeluruh, terpadu terarah, dan bertahap yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat, serta berusaha untuk memacu peningkatan kemampuan dalam meningkatkan kehidupan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Pembangunan Nasional memang tidak bisa dipisahkan dengan pemberdayaan. Pemberdayaan mestinya mendorong pembangunan nasional menuju kearah yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pembangunan nasional. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan sehingga dapat memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan ekonomi (Mardikanto, 2015: 27). Pada era otonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Pembangunan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Diperlukan berbagai upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Salah satu yang menjadi potensi untuk mendorong kemajuan perekonomian di tiap daerah adalah keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Diakui, bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting didalam pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di Negara-negara maju. Di Negara maju UKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di Negara yang sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar (BPS 2018).

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018, Perkembangan UMKM sepanjang tahun 2018 terbukti mampu berkontribusi dalam pembentukan PDB sebesar 55,649%. Perinciannya sebagai berikut, sebanyak 40,729% oleh Usaha Mikro, sejumlah 10,815% oleh Usaha Kecil, dan sejumlah 1,944% oleh Usaha Menengah. Nilai rata-rata pembentukan PDB oleh UMKM Rp 24,8 juta per unit usaha. UMKM juga melakukan investasi baru selama 2018, yang nilainya mencapai Rp 13,8 triliun, atau 49,11% dari total investasi baru di 2018. Penambahan investasi baru terbesar datang dari Usaha Menengah yaitu sebesar Rp 12,7 triliun, atau setara 92% dari total investasi baru UMKM. UMKM mampu merekrut tenaga kerja baru sebanyak 2,32 juta orang, atau setara dengan 97,8% dari lapangan kerja baru yang diciptakan UMKM dan usaha besar di tahun 2011. Penyerapan tenaga kerja baru banyak dilakukan oleh Usaha Mikro, jumlahnya 1,94 juta orang, termasuk mempekerjakan dirinya sendiri. Usaha Kecil mampu menyerap tenaga kerja baru sebanyak 292.000 orang.

Salah satunya dengan mengembangkan perkoperasian di Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi, karena koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Oleh Karen itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Manggarai melaksanakan program Simpan Pinjam dengan tujuan:1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu Negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Dengan UKM yang kuat maka

struktur ekonomi menjadi kokoh, yang berperan besar dalam Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika ekonomi kerakyatan menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing tinggi. Salah satu faktor pembangunan ekonomi kerakyatan yang memegang peranan penting dan strategis adalah pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Kontribusi UKM dalam pembangunan ekonomi yaitu sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, memberikan pemasukan devisa bagi Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengembangan UKM dilakukan secara terus menerus dengan selalu memperhatikan aspek pendidikan permodalan, produktivitas, sarana/prasarana, pemasaran serta pemanfaatan lembaga pemerintah dan swasta secara maksimal, untuk mewujudkan UKM modern dan berdaya saing. Pemberdayaan UKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional untuk perbaikan kesejahteraan rakyat. Selain mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor rill, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan UKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru disektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumber daya lokal (Gie Kian, K, 2003).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah memberikan landasan hukum yang kuat untuk tumbuh kembangnya usaha kecil menengah. Perkembangan usaha kecil menengah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Manggarai untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang lebih produktif dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dibidang usaha kecil. Strategi yang disusun oleh dinas koperasi untuk melindungi usaha kecil menengah dalam rangka pembinaan pelaku UKM menjadi factor penting dalam proses perkembangannya. Program-program yang disusun selama ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manajemen pelaku usaha kecil menengah termasuk kualitas produk serta pemasaran. Penciptaan iklim yang kondusif dilakukan, akses permodalan diperbanyak dan dipermudah, pendidikan kewirausahaan dan keterampilan diperluas, mendorong dan mempermudah usaha kecil dan menengah dalam bermitra usaha serta menjual hasil produksinya.

Keberadaan sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai berdampak besar terhadap perkembangan usaha-usah kecil seperti usaha kuliner dan lain sebagainya yang tersebar dimana-mana. Apabila dikelola secara lebih profesional keberadaan usaha kecil itu tentu sangat menguntungkan bagi kemajuan perekonomian masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha-usaha kecil agar berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Strategi ini berusaha untuk memenangkan persaingan dengan pendekatan harga, dimana dengan harga tertentu produk yang dihasilkan akan lebih

diminati banyak konsumen. Dalam keunggulan biaya UKM perusahaan berusaha menawarkan barang yang dijual dengan harga yang lebih rendah dibanding barang yang sejenis yang berada dalam suatu kelompok industri tertentu.

Keberadaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Manggarai tidak lari jauh dari persoalan-persoalan mendasar yang menyebabkan menghambatnya proses tumbuh kembang usaha. Masalah itu antara lain adalah masih kurangnya perhatian dari pemerintah, buktinya usaha-usaha kecil seperti kuliner tersebar dimana-mana sehingga memunculkan kesan kekumuhan. Penyebaran usaha-usaha kecil seperti kuliner yang tidak teratur juga berdampak negatif terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat misalnya mengganggu arus lalu lintas yang menyebabkan kemacetan serta mengganggu ketertiban dan keamanan. Di sisi lain permasalahan UKM di Kabupaten Manggarai berkaitan dengan permodalan, pemasaran, pengelolaan yang kurang profesional. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki UKM. Hal ini tentunya menghambat proses tumbuh kembangnya UKM yang semestinya dapat mengubah perekonomian masyarakat. Melihat permasalahan yang dihadapi UKM tersebut, dibutuhkan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pemberdayaan UKM. Sehubungan dengan itu Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Koperasi dan UKM memiliki program pemberdayaan UKM.

Sehubungan dengan itu untuk mengetahui lebih jelas tentang usaha pemerintah Kabupaten Manggarai dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM), maka hal ini adalah sesuatu yang penting untuk dikaji. Dari uraian tersebut diatas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang pemberdayaan UKM di Kabupaten Manggarai dan menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan judul; “PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MANGGARAI DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Untuk melihat dan mengkaji permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka dirumuskan apakah yang dimaksud dengan masalah, sehingga nantinya akan memberikan kejelasan pada permasalahan yang akan dibahas maka dalam hal ini permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM)?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam setiap kegiatan bentuk apapun didalamnya pasti mengandung suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan merupakan hal yang penting dan harus diketahui oleh peneliti yang hendak melakukan suatu kegiatan tertentu karena tujuan yang ingin dicapai itu akan memberikan arahan terhadap kegiatan yang telah dilakukannya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat proses pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru, dalam memberdayakan masyarakat serta memperkaya hasil penelitian tentang Usaha Kecil Menengah (UKM)
  - b. Kalangan Akademis, untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik yang diperoleh selama studi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya dinas terkait dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM)
- b. Penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah gejala-gejala ekonomi yang ada dalam dunia nyata berdasarkan teori-teori yang pernah diperoleh. Adapun temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang Usaha Kecil Menengah (UKM), dan juga mengembangkannya dibidang lainnya.